

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099186/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 - 3. Provinsi : (06) ACEH
 - 4. Kode>Nama Satker : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
 - Sebesar : Rp. 46.119.000 (EMPAT PULUH ENAM JUTA SERATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang
Rp. 46.119.000
Rp. 46.119.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	46.119.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MEULABOH (003) Rp. 46.119.000

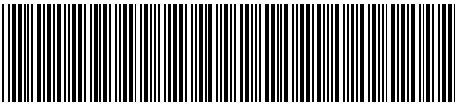
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4281-8712-0025-2942

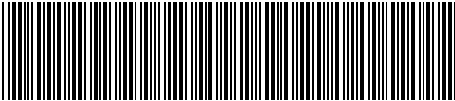
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				46.119.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				46.119.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
	:	2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
	:	3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
	:	4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
	:	5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan		1.500.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan		1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	30,00	Perkara, Berkas Perkara		12.550.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	30.00	Perkara		12.550.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	47,00	Orang		28.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	47.00	Orang		28.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	4,00	Perkara, Berkas Perkara		4.069.000
Rincian Output	:	01 QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan (PN)	4.00	Perkara		4.069.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
I B. SUMBER DANA



DS:4281-8712-0025-2942

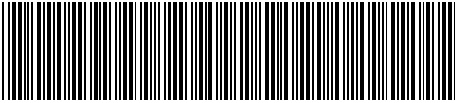
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	46.119.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	46.119.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

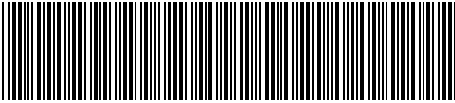


DS:4281-8712-0025-2942

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG	-	46.119	-	-	-	46.119	06 . 09	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	46.119	-	-	-	46.119		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	46.119	-	-	-	46.119		
1049.AEA	Koordinasi (06.09 ACEH / KAB. SIMEULUE)	-	1.500	-	-	-	1.500		
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.09 ACEH / KAB. SIMEULUE)	-	12.550	-	-	-	12.550		
01	RM	-	12.550	-	-	-	12.550		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (06.09 ACEH / KAB. SIMEULUE)	-	28.000	-	-	-	28.000		
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	003	06 . 09
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (06.09 ACEH / KAB. SIMEULUE)	-	4.069	-	-	-	4.069		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4281-8712-0025-2942

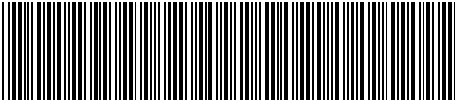
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	4.069	-	-	-	4.069	003@	
JUMLAH		-	46.119	-	-	-	46.119		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4281-8712-0025-2942

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG

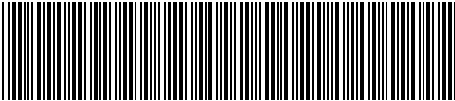
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099186 005.03.BF.1049	PENGADILAN NEGERI SINABANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	23	2.623	3.511	3.511	3.511	3.511	4.271	7.590	3.561	3.521	4.271	6.221	46.119
		BELANJA BARANG	23	2.623	3.511	3.511	3.511	3.511	4.271	7.590	3.561	3.521	4.271	6.221	46.119
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	23	2.623	3.511	3.511	3.511	3.511	4.271	7.590	3.561	3.521	4.271	6.221	46.119
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	23	2.623	3.511	3.511	3.511	3.511	4.271	7.590	3.561	3.521	4.271	6.221	46.119
		PERKIRAAN PENERIMAAN	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	9.216
		- PNBP (425232)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	370
		- PNBP (425233)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	910
		- PNBP (425239)	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	7.936

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
IV A. B L O K I R



DS:4281-8712-0025-2942

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [099186] PENGADILAN NEGERI SINABANG

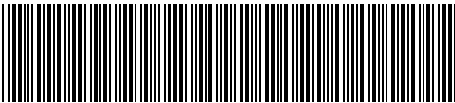
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 3.625 52 Belanja Barang Rp. 3.625		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 840 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.035 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099186/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4281-8712-0025-2942

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [099186] PENGADILAN NEGERI SINABANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002